

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi Program Sistem Informasi Masjid (SIMAS) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Meskipun SIMAS telah diperkenalkan sejak tahun 2014, masih terdapat masjid dan musholla yang belum terdaftar, data yang belum lengkap serta rendahnya pemahaman pengurus masjid terhadap sistem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi SIMAS serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuasi-kualitatif (*quasi qualitative*) dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap 17 informan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Penelitian ini menggunakan teori *Digital Era Governance (DEG)* dari Dunleavy dkk. Serta teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMAS dilakukan melalui tahapan pendataan, penginputan data dan pelaporan. Jumlah rumah ibadah terdaftar meningkat dari 111 unit pada tahun 2025 menjadi 118 unit pada tahun 2026 namun implementasi nya belum optimal karena rendahnya pemahaman dan partisipasi pengurus masjid. Faktor pendukung yaitu koordinasi kelembagaan yang terintegrasi antar pemangku kepentingan, kesiapan infrastruktur dan kapasitas internal KUA, potensi penerimaan dan dukungan pengurus masjid terhadap SIMAS. Sementara itu, faktor penghambat meliputi sosialisasi dan komunikasi implementasi yang belum berkelanjutan, rendahnya literasi digital dan keterbatasan partisipasi pengurus, data belum terintegrasi dan belum terbaru secara berkelanjutan

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi Masjid, SIMAS, Digital Era Governance, Reintegration, Needs Based Holism, Digitization, KUA Bilah Hilir

ABSTRACT

This research is motivated by the suboptimal implementation of the Mosque Information System (SIMAS) Program at the Religious Affairs Office in Bilah Hilir District, Labuhanbatu Regency. Although SIMAS was introduced in 2014, there are still unregistered mosques and prayer rooms (musholla), incomplete data, and low understanding of the system among mosque administrators. This study aims to analyze SIMAS implementation and identify supporting and inhibiting factors. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation of 17 informants. Data analysis uses the Mile and Huberman model. This study utilizes the Digital Era Governance (DEG) theory by Dunleavy et al., as well as the policy implementation theory of George C. Edward III. The results show that SIMAS implementation is carried out through the stages of data collection, data input, and reporting. The number of registered houses of worship increased from 111 units in 2025 to 118 units in 2026, but implementation is not optimal due to low understanding and participation among mosque administrators. Supporting factors include institutional coordination, operator capacity, adequate infrastructure, and support from the Indonesian Mosque Council. Meanwhile, inhibiting factors include minimal outreach, low digital literacy among mosque administrators, incomplete administrative documents, server disruptions, and low independent feature utilization.

Keywords: Policy Implementation, Mosque Information System, SIMAS, Digital Era Governance, Reintegration, Needs-Based Holism, Digitization, KUA Bilah Hili